



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN



Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116
Telp. (031) 3095361
Email : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sebagai dokumen penting diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama periode 2024 - 2026. Gambaran tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja yang disusun berdasarkan isu strategis dan arah kebijakan hasil telaahan telah kami susun dalam rangka menangani permasalahan sosial di Kabupaten Bangkalan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan lancar sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan dapat terwujud.

Bangkalan, 14 April 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	 8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	33
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 35
3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah	 35
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	41
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 42
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD	42
4.2. Cascading Kinerja PD	44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan amanat tersebut kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan dibedakan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren itulah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, di mana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan di bidang sosial merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu diperlukan

perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini dikelompokkan ke dalam permasalahan :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kita menyadari bahwa, dalam proses pembangunan, pada kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. Sebagaimana juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.*

Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Bangkalan memiliki kewajiban melakukan penyusunan kembali rencana strategis untuk tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan oleh *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru* sebagai upaya dalam mengatasi masalah sosial di Kabupaten Bangkalan yang semakin kompleks melalui pelayanan dan

pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal.

Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksana pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
- 24) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
- 25) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 – 2026 dimaksudkan untuk :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 2) Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Menyediakan instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil / pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 4) Menyediakan instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- 2) Melaksanakan koordinasi antar pimpinan dan dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- 3) Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) periode 2024 – 2026;
- 4) Memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

1.4. Sistematika Tulisan

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya)
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1. Kedudukan

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan



Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya secara dapat dijelaskan uraian tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pemberdayaan sosial.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial.

e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) serta Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka fungsi Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang memfasilitasi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut terbagi secara rinci pada bidang-bidang teknis sebagai berikut :

a. Sekretaris

Adapun fungsi Sekretaris adalah :

- 1) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) pengelolaan asset dan barang milik Negara/daerah;
- 6) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- 10) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
- 3) penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak

kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;

- 4) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
- 5) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;
- 6) pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Merekomendasikan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan

pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut, aksebelitas sosial lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis;

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 2) perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pelestarian dan penanaman nilai - nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman makam Pahlawan Nasional, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerjaan sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpanan pengumpulan / pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan Penanganan Fakir Miskin;

- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penanganan Fakir Miskin;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terkait Penanganan Fakir Miskin;
- 6) pengendalian pelaksanaan Penanganan Fakir miskin
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanganan Fakir Miskin
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman teknis, identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan keterampilan serta bantuan sosial UEP, reassesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
- 3) pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau instansi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 2) pelaksanaan Kebijakan Teknis pengembangan pelayanan sosial, kajian program kegiatan Kesejahteraan Sosial, pengembangan model Kesejahteraan Sosial, uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas warga binaan sosial serta pembinaan lanjut di bidang Kesejahteraan Sosial, pengembangan publikasi kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial penyuluhan sosial, pengelolaan website, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial, pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan pembuatan jejaring;
- 3) penyusunan kebijakan pengembangan pelayanan sosial;
- 4) pemberian bimbingan teknis pengembangan pelayanan sosial;
- 5) pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan pelayanan sosial;
- 6) pengawasan penyelenggaraan pengembangan pelayanan sosial;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Pegawai

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, maka Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan seharusnya mempunyai ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya lainnya berupa aset/barang inventaris (sarana dan prasarana) serta anggaran yang memadai. Dinas Sosial Kab. Bangkalan dalam melaksanakan tugas-tugas didukung oleh pegawai 79 orang pegawai yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 orang Non PNS.

Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	7
3	S1	22
4	Diploma	-
5	SLTA	13
6	SLTP	1
	Total	43

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

2) Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	7
2	III	24
3	II	12
4	I	-

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

3) Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV dan Pejabat Fungsional	12
4	Staf PNS	25
5	Staf Non PNS	36

Sumber : data kepegawaian Dinas Sosial Kab. Bangkalan

4) Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	PNS	Non PNS
1	L = 27 orang	L = 14 orang
2	P = 16 orang	P = 22 orang

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang terletak di Jl. Halim Perdanakusuma No. 5 Bangkalan didukung oleh sarana dan prasarana berupa aset/barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, peralatan kantor dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sampai dengan akhir tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Sarana dan Prasarana

No Urut	Nama Bidang/Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	2	3	4
01	TANAH	1	
02	PERALATAN DAN MESIN a. Alat-alat Angkutan - Truk tangki air - Pick up - Kendaraan Dinas - Sepeda Motor c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3 1 3 18 401	Untuk distribusi air Rusak 13
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	9	Bangunan bersejarah (2), Tempat Ibadah (1), Gedung Kantor (6)

Sumber : data inventaris barang Dinas Sosial Kab. Bangkalan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi pelayanan urusan sosial pada periode 2019 – 2023 yang menjadi core bisnis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PPKS/PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya		100%		6,69%	7,81%	8,93%	10,04 %	10,04 %	6%	7%	7,91%	8 %		89,69	89,63	88,58	79,68	

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I.	Program Pelayanan Kesekretariatan																	
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.336.288.800	1.205.145.471	-	-	-	1.179.613.252	1.181.218.156	-	-	-	88,28	98,01				1.270.717.136	1.180.415.704
2	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	135.000.000	63.019.370	-	-	-	129.028.279	62.969.370	-	-	-	95,58	99,92				99.009.685	95.998.825
3	Pengelolaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah		1.956.700	-	-	-	-	1.953.000	-	-	-	0,00	99,81				1.956.700	976.500
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.861.200	107.195.100	-	-	-	80.657.552	105.744.718	-	-	-	82,42	98,65				102.528.150	93.201.135
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.285.900	120.528.798	-	-	-	94.905.900	118.778.798	-	-	-	95,59	98,55				109.907.349	106.842.349
6	Peningkatan Disiplin Pegawai	-	23.447.500	-	-	-	-	23.446.600	-	-	-	0,00	100,00				11.723.750	11.723.300
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				0	0
8	Penyusunan Perencanaan dan Informasi	25.000.000	23.289.900	-	-	-	14.664.300	13.913.700	-	-	-	58,66	59,74				24.144.950	14.289.000

	Perangkat Daerah																	
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	7.200.000	5.421.800	-	-	-	7.200.000	4.950.000	-	-	-	100,00	91,30				6.310.900	6.075.000
10	Penyusunan Laporan Keuangan	7.200.000	7.440.000	-	-	-	7.200.000	6.727.900	-	-	-	100,00	90,43				7.320.000	6.963.950
11	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional	15.000.000	-	-	-	-	14.500.000	-	-	-	-	96,67	0,00				7.500.000	7.250.000
II	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial																	
12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	83.300.000	750.000.000	-	-	-	16.043.000	726.800.000	-	-	-	19,26	96,91				416.650.000	371.421.500
13	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial	90.000.000	24.924.800	-	-	-	52.850.660	23.214.800	-	-	-	58,72	93,14				57.462.400	38.032.730
14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	49.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				24.562.500	0
II I.	Program Pemberdayaan Sosial																	
15	Penanganan Fakir Miskin	325.425.000	2.561.825.500	-	-	-	174.289.400	2.504.573.206	-	-	-	53,56	97,77				1.443.625.250	1.339.431.303
16	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	97.030.000	35.000.000	-	-	-	96.454.000	34.779.900	-	-	-	99,41	99,37				66.015.000	65.616.950

17	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumberdaya Sosial	105.000.000	114.613.300	-	-	-	70.293.100	114.613.300	-	-	-	66,95	100,00				109.806.650	92.453.200
18	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan		-	-	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00				0	0
I V .	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial																	
19	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	177.850.000	156.592.100	-	-	-	113.978.800	100.179.445	-	-	-	64,09	63,97				167.221.050	107.079.123
20	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.509.459.100	147.103.200	-	-	-	645.745.217	136.708.200	-	-	-	42,78	92,93				828.281.150	391.226.709
21	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	25.000.000	18.745.000	-	-	-	4.849.000	13.280.000	-	-	-	19,40	70,85				21.872.500	9.064.500
V .	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial																	
22	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	48.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				24.062.500	0
23	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	49.825.000	-	-	-	-	49.758.000	-	-	-	-	99,87	0,00				24.912.500	24.879.000
24	Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	29.600.000	-	-	-	-	29.300.000	-	-	-	-	98,99	0,00				14.800.000	14.650.000

	JUMLAH	4.312.57 5.000	5.366.24 8.539	-	-	-	2.781.33 0.460	5.173.85 1.093	-	-	-	64, 49	96,41	-	-	-	0	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA			5.631.91 3.067	6.141.32 4.708			5.484.49 5.572	5.852.01 3.163			0,0 0	0,00	97,38	95,29			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.900.7 50	17.440.3 00			12.408.0 00	9.905.55 0			0,0 0	0,00	78,03	56,80			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.492.70 0	5.679.25 0			5.730.00 0	4.155.75 0			0,0 0	0,00	88,25	73,17		6.085.9 75	4.942.8 75
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2.696.00 0	3.959.20 0			2.428.00 0	1.492.20 0			0,0 0	0,00	90,06	37,69		3.327.6 00	1.960.1 00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			2.547.65 0	2.941.20 0			1.065.00 0	-			0,0 0	0,00	41,80	0,00		2.744.4 25	532.50 0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.208.20 0	2.166.50 0			3.185.00 0	2.164.60 0			0,0 0	0,00	99,28	99,91		2.687.3 50	2.674.8 00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			956.200	2.694.15 0			-	2.093.00 0			0,0 0	0,00	0,00	77,69		1.825.1 75	1.046.5 00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.895.10 6.588	3.945.74 1.990			3.838.33 5.364	3.847.90 8.487									

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.886.27 2.588	3.931.89 5.290				3.830.41 8.664	3.834.51 0.487		0,0 0	0,00	98,56	97,52		3.909.0 83.939	3.832.4 64.576
9	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD			-	2.954.30 0					2.557.50 0		0,0 0	0,00	0,00	86,57		1.477.1 50	2.557.5 00
10	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				3.719.85 0					3.689.60 0		0,0 0	0,00	0,00	99,19		3.719.8 50	3.689.6 00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.834.00 0	3.955.05 0				3.472.30 0	3.944.10 0		0,0 0	0,00	90,57	99,72		3.894.5 25	3.708.2 00
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			5.000.00 0	3.217.50 0				4.444.40 0	3.206.80 0		0,0 0	0,00	88,89	99,67		4.108.7 50	3.825.6 00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.952.40 0	1.503.50 0				1.920.00 0	1.498.00 0		0,0 0	0,00	98,34	99,63		1.727.9 50	1.709.0 00
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.952.40 0	1.503.50 0				1.920.00 0	1.498.00 0		0,0 0	0,00	98,34	99,63		1.727.9 50	1.709.0 00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.506.8 50	17.753.4 00				30.335.0 00	17.228.0 50		0,0 0	0,00	99,44	97,04		24.130. 125	23.781. 525
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			30.506.8 50	14.850.0 00				30.335.0 00	14.400.0 00		0,0 0	0,00	99,44	96,97		22.678. 425	22.367. 500
17	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				1.132.00 0					1.128.80 0		0,0 0	0,00	0,00	99,72		1.132.0 00	1.128.8 00

18	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				1.771.400				1.699.250		0,00	0,00	0,00	95,93		1.771.400	1.699.250
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah			124.919.879	279.269.375			91.985.557	268.323.278		0,00	0,00	73,64	96,08		202.094.627	180.154.418
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.447.800	3.495.500			3.241.000	2.010.000		0,00	0,00	94,00	57,50		3.471.650	2.625.500
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	41.654.675			-	39.600.000		0,00	0,00	0,00	95,07		20.827.338	19.800.000
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.813.950	5.009.000			4.268.400	4.660.500		0,00	0,00	88,67	93,04		4.911.475	4.464.450
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			92.217.849	54.055.000			64.178.307	52.296.000		0,00	0,00	69,59	96,75		73.136.425	58.237.154
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.898.280	16.770.800			13.595.850	15.001.750		0,00	0,00	80,46	89,45		16.834.540	14.298.800
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.240.000	15.520.000			2.400.000	13.400.000		0,00	0,00	74,07	86,34		9.380.000	7.900.000
26	Fasilitasi kunjungan tamu				6.368.000				6.363.500		0,00	0,00	0,00	99,93		6.368.000	6.363.500
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.302.000	90.096.400			4.302.000	88.873.800		0,00	0,00	100,00	98,64		47.199.200	46.587.900
28	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan				46.300.000				46.117.728		0,00	0,00	0,00	99,61		46.300.000	46.117.728

	berbasis elektronik pada SKPD																	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.120.150	265.823.943				34.698.000	253.790.920		0,00	0,00	98,80	95,47		150.472.047	144.244.460
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.120.150	265.823.943				34.698.000	253.790.920		0,00	0,00	98,80	95,47		150.472.047	144.244.460
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.221.215.550	1.129.341.880				1.182.310.181	1.052.125.119		0,00	0,00	96,81	93,16		1.175.278.715	1.117.217.650
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.660.000	0				5.238.000	0		0,00	0,00	78,65	0,00		3.330.000	2.619.000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			107.880.300	97.714.380				82.083.414	94.672.407		0,00	0,00	76,09	96,89		102.797.340	88.377.911
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			51.518.250	-				47.327.592	-		0,00	0,00	91,87	0,00		25.759.125	23.663.796
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.055.157.000	1.031.627.500				1.047.661.175	957.452.712		0,00	0,00	99,29	92,81		1.043.392.250	1.002.556.944
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.190.900	484.450.320				292.503.470	401.233.759		0,00	0,00	95,22	82,82		395.820.610	346.868.615

3 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			235.158.000	156.000.000				235.158.000	154.878.000		0,0 0	0,00	100,0 0	99,28		195.57 9.000	195.01 8.000
3 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.537.900	234.748.880				53.660.470	170.620.759		0,0 0	0,00	81,88	72,68		150.14 3.390	112.14 0.615
3 6	Pemeliharaan Mebel			-	1.420.000				-	550.000		0,0 0	0,00	0,00	38,73		710.00 0	275.00 0
3 7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	63.281.440				-	63.160.000		0,0 0	0,00	0,00	99,81		31.640. 720	31.580. 000
3 8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.495.000	29.000.000				3.685.000	12.025.000		0,0 0	0,00	56,74	41,47		17.747. 500	7.855.0 00
II .	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			258.313.950	472.736.700				214.658.005	442.940.800		0,0 0	0,00	83,10	93,70		365.52 5.325	328.79 9.403
I.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			258.313.950	472.736.700				214.658.005	442.940.800		0,0 0	0,00	83,10	93,70		365.52 5.325	328.79 9.403

4 0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			88.770.650	146.016.700				86.360.000	143.263.000		0,00	0,00	97,28	98,11		117.393.675	114.811.500
4 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			125.410.150	107.336.000				95.885.000	83.035.000		0,00	0,00	76,46	77,36		116.373.075	89.460.000
4 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			44.133.150	219.384.000				32.413.005	216.642.800		0,00	0,00	73,44	98,75		131.758.575	124.527.903
II I.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			624.007.350	1.450.503.459				571.916.150	1.239.422.789		0,00	0,00	91,65	85,45		1.037.255.405	905.669.470
J .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			590.336.350	1.397.897.009				540.863.700	1.195.501.709		0,00	0,00	91,62	85,52		994.116.680	868.182.705

43	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			42.370.000	694.922.500				33.235.000	603.359.000		0,00	0,00	78,44	86,82		368.646.250	318.297.000
44	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			547.966.350	702.974.509				507.628.700	592.142.709		0,00	0,00	92,64	84,23		625.470.430	549.885.705
K.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			33.671.000	52.606.450				31.052.450	43.921.080		0,00	0,00	92,22	83,49		43.138.725	37.486.765
45	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			33.671.000	52.606.450				31.052.450	43.921.080		0,00	0,00	92,22	83,49		43.138.725	37.486.765
I.V.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.374.985.422	1.614.792.830				3.728.917.172	1.281.717.150		0,00	0,00	85,23	79,37		2.994.889.126	2.505.317.161
L.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan			4.374.985.422	1.614.792.830				3.728.917.172	1.281.717.150		0,00	0,00	85,23	79,37		2.994.889.126	2.505.317.161

	Daerah Kabupaten/Kota																	
4 6	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.373.66 2.572	759.458. 750				3.727.69 2.172	683.545. 000		0,0 0	0,00	85,23	90,00		2.566.5 60.661	2.205.6 18.586
4 7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.322.85 0	832.519. 480				1.225.00 0	577.830. 000		0,0 0	0,00	92,60	69,41		416.92 1.165	289.52 7.500
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			0	22.814.6 00				-	20.342.1 50		0,0 0	0,00	0,00	89,16		11.407. 300	10.171. 075
V .	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			318.815. 828	4.322.76 8.987				208.738. 750	3.343.19 7.500		0,0 0	0,00	65,47	77,34		2.320.7 92.408	1.775.9 68.125
M .	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			195.182. 728	4.097.60 0.437				90.083.7 50	3.203.45 2.500		0,0 0	0,00	46,15	78,18		2.146.3 91.583	1.646.7 68.125
4 8	Penyediaan Makanan			195.182. 728	4.097.60 0.437				90.083.7 50	3.203.45 2.500		0,0 0	0,00	46,15	78,18		2.146.3 91.583	1.646.7 68.125
N .	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			123.633. 100	225.168. 550				118.655. 000	139.745. 000		0,0 0	0,00	95,97	62,06		174.40 0.825	129.20 0.000
4 9	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			123.633. 100	225.168. 550				118.655. 000	139.745. 000		0,0 0	0,00	95,97	62,06		174.40 0.825	129.20 0.000
V I.	PROGRAM PENGELOLAAN			307.873. 200	146.930. 000				243.297. 800	136.684. 900		0,0 0	0,00	79,03	93,03		227.40 1.600	189.99 1.350

	TAMAN MAKAM PAHLAWAN																	
O	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			307.873.200	146.930.000				243.297.800	136.684.900		0,00	0,00	79,03	93,03		227.401.600	189.991.350
50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			136.621.500	128.790.000				134.476.000	124.839.900		0,00	0,00	98,43	96,93		132.705.750	129.657.950
51	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			171.251.700	18.140.000				108.821.800	11.845.000		0,00	0,00	63,54	65,30		94.695.850	60.333.400
				11.515.908.817	14.149.056.684				10.452.023.449	12.295.976.302				90,76	86,90			

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, maka kelompok sasaran layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah PMKS/PPKS dan PSKS.

Yang termasuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS, yaitu :

- 1 Anak balita telantar
- 2 Anak terlantar
- 3 Anak yang berhadapan dengan hukum
- 4 Anak jalanan
- 5 Anak dengan Kedisabilitas
- 6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- 7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 8 Lanjut usia telantar
- 9 Penyandang disabilitas
- 10 Tuna Susila
- 11 Gelandangan
- 12 Pengemis
- 13 Pemulung
- 14 Kelompok Minoritas
- 15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- 16 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 17 Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18 Korban trafficking
- 19 Korban tindak kekerasan
- 20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 21 Korban bencana alam
- 22 Korban bencana sosial
- 23 Perempuan rawan sosial ekonomi
- 24 Fakir Miskin
- 25 Keluarga bermasalah sosial psikologis

26 Komunitas Adat Terpencil

Sedangkan yang termasuk dalam kriteria Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12. Dunia Usaha

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan adalah “meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara umum permasalahan terkait pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sesuai tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penerapan SPM urusan sosial sesuai kewenangan kabupaten/kota
- 2) Data PPKS yang belum valid dalam rangka pelayanan yang tepat sasaran.
- 3) Kurangnya tenaga ahli dalam pelayanan rehabilitasi sosial
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat.

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut :

- a. Melalui program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melalui Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

- Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti;
- c. Melalui Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Melalui Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - e. Melalui Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - f. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Sosial pada Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan rentan melalui :
 - a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

- b. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan
- c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
- 2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.
- 4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangkalan, kebijakan tata ruang merupakan bagian integrasi dari kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014, Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bangkalan adalah:

Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura untuk menjadikan kota Industri, pariwisata, dan jasa yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang religius dan berbudaya serta berazaskan pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan ini adalah untuk mewujudkan semua potensi, masalah, dan prospek pengembangan Kabupaten Bangkalan dalam konteks regional dan nasional.

A. Pengembangan Wilayah di Dalam RTRW

- 1. Kebijakan pengembangan wilayah, meliputi:
 - a. pemantapan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur sekaligus di Kabupaten Bangkalan;
 - b. peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.

2. Strategi untuk memantapkan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan, meliputi:
 - a. pengembangan ekonomi wilayah berbasis strategi pemasaran kota;
 - b. pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala nasional dan regional;
 - c. pengembangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi skala Nasional dan regional;
 - d. peningkatan kemudahan investasi untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Bangkalan;
 - e. peningkatan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara kabupaten dan antar perkotaan lainnya; dan
 - f. pengembangan kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN berbasis ekologi.
3. Strategi untuk meningkatkan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten Bangkalan dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan, meliputi:
 - a. pemantapan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agrobisnis dan agroindustri di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan
 - c. pemantapan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri atas lembaga tani dan lembaga keuangan; dan
 - d. pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan berbasis eco-region.

B. Rencana Sistem Dan Fungsi Perwilayahan

Dalam kerangka untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Kebijakan tata ruang melalui perwilayahan pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Hambatan antara daerah pusat dan daerah belakang

- b. Homogenitas atau kesamaan karakteristik wilayah.
- c. Kesamaan lingkungan yang membutuhkan penanganan lingkungan dalam bentuk terpadu.

Adanya konsep perwilayahan ini dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Konsep perwilayahan pembangunan bertujuan:

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam dan antar wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil.
- b. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat di setiap wilayah dan sub wilayah pembangunan.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar wilayah dan sub wilayah pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalannya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, polkam, sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang serta memperkuat perkembangan regional dan nasional.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) adalah sebagai berikut:

Rencana Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan

No	Sub Satuan Wilayah Pengembangam (SSWP)	Pusat Pengembangan	Kecamatan Pengaruhnya	Fungsi Utama
1	SSWP-1	Perkotaan Bangkalan	• Kecamatan Bangkalan • Kecamatan Burneh • Kecamatan Socah	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut dan Darat
2	SSWP-2	Perkotaan Labang	• Kecamatan Kamal • Kecamatan Labang • Kecamatan Kwanyar • Kecamatan Tragah	• Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut dan Darat • Pertanian • Perikanan
3	SSWP-3	Perkotaan Klampis	• Kecamatan Klampis • Kecamatan Sepulu • Kecamatan Arosbaya	• Industri dan Pergudangan • Transportasi Laut • Perikanan • Pertanian
4	SSWP-4	Perkotaan Blega	• Kecamatan Konang • Kecamatan Blega • Kecamatan Modung	• Pertanian • Perikanan • Perkebunan
5	SSWP-5	Perkotaan Tanjungbumi	• Kecamatan Tanjungbumi • Kecamatan Kokop	• Pertanian • Perkebunan • Perikanan • Industri Kecil
6	SSWP-6	Perkotaan Tanah Merah	• Kecamatan tanah Merah • Kecamatan Geger • Kecamatan Galis	• Pertanian • Perkebunan • Kehutanan

Sumber : Reviu RTRW Kabupaten Bangkalan

**Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Upaya mendukung memperkecil disparitas wilayah melalui program P2DT2 sesuai dengan kebijakan RTRW dalam penanganan Daerah Tertinggal dan terpencil	Koordinasi antar PD belum optimal dalam membangun daerah terpencil dan tertinggal	Otonomi daerah, kondisi geografi	Partisipasi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal
2	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Nilai Kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- Peningkatan pemahaman dan penerapan SPM urusan sosial sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kompetensi para sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
- Kompleksitas permasalahan PMKS/PPKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)
- Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

A. Tujuan

- 1 Meningkatkan PPKS yang tertangani, dengan indikator : Persentase PPKS yang tertangani

B. Sasaran Strategi Jangka Menengah

Adapun Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya capaian SPM urusan sosial, dengan Indikator : Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial.
2. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial dengan indikator : a. Indeks Kepuasan Masyarakat dan b. Nilai SAKIP

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN						SASARAN					
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET				URAIAN	INDIKATOR	TARGET			
			2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027
1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22%	7,69%	9,16%	9,16%	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13%	14%	15%	15%
							Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78,5	79	79
								Nilai SAKIP	61	61,5	61,7	61,7

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan rencana target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan berdasarkan program prioritas daerah menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Rencana target kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan disusun sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T.1	Persentase PPKS yang tertangan i					6,22%	10.762.996.180	6,22%	8.673.437.826	7,69%	8.914.913.346	9,16%	9.653.413.346
S.1		Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial				100%	3.438.993.311	100	2.472.814.000	100	2.622.814.000	100	3.122.814.000

P.1			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100	1.284.875.091	100	1.200.000.000	100	1.250.000.000	100	1.600.000.000
K.1				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		800	421.774.000	550	350.000.000	600	400.000.000	700	750.000.000
1					Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	800	421.774.000	550	350.000.000	600	400.000.000	700	750.000.000

K.2				Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani		580	863.101.091	580	850.000.00 0	630	850.000.00 0	680	850.000.00 0
2					Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	550	715.381.191	550	730.000.00 0	600	730.000.00 0	650	730.000.00 0
3					Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	30	147.719.900	30	120.000.00 0	30	120.000.00 0	30	120.000.00 0
P.2			Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial			100	1.124.727.10 0	100	722.814.00 0	100	822.814.00 0	100	972.814.00 0
K.3				Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		100	1.124.727.10 0	100	722.814.00 0	100	822.814.00 0	100	972.814.00 0
4					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	50.000	400.000.000	50.000	300.000.00 0	50.000	300.000.00 0	50.000	400.000.00 0

5				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	980	200.974.750	1850	400.000.00 0	2000	500.000.00 0	2000	550.000.00 0
6				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500	523.752.350	20	22.814.000	20	22.814.000	20	22.814.000
P.3			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	1.029.391.12 0	100	550.000.00 0	100	550.000.00 0	100	550.000.00 0
K.4			Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani		100	834.277.420	100	500.000.00 0	100	500.000.00 0	100	500.000.00 0
7				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	425	834.277.420	1000	500.000.00 0	1000	500.000.00 0	1000	500.000.00 0

K.5				Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100	195.113.700	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
8					Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	195.113.700	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000
S.2		Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				11,46	508.605.350	13	503.000.000	14	503.000.000	15	573.000.000
P.4			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			11,46	345.861.550	13	375.000.000	14	375.000.000	15	445.000.000
K.6				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina		19	345.861.550	28	375.000.000	28	375.000.000	29	445.000.000

9				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	18	135.069.050	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000
10				Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota		108.652.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000
11				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	1	102.140.500	10	125.000.000	10	125.000.000	11	175.000.000
P.5			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola		100	162.743.800	100	128.000.000	100	128.000.000	100	128.000.000
K.7			Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		1	162.743.800	1	128.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000
12				Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	126.149.000	50	38.000.000	50	38.000.000	50	38.000.000
13				Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	36.594.800	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000
S.3		Indeks Kepuasan Masyarakat			77,55	6.815.397.519	82	5.697.623.826	85	5.789.099.346	89	5.957.599.346
S.4		Nilai SAKIP			60,7		60,5		61,5		61,7	

P.6			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	6.815.397.519	100	5.697.623.826	100	5.789.099.346	100	5.957.599.346
K.8				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu		100	24.695.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	14.500.000
14					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6.970.550	2	4.500.000	2	4.500.000	2	6.500.000
15					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	4.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000
16					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	4.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000
17					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.895.450	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
18					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4.829.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000

K.9				Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100	4.073.687.930	100	4.057.004.846	100	4.148.004.846	100	4.192.804.846
19					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	4.058.193.680	43	4.047.004.846	43	4.138.004.846	43	4.176.504.846
20					Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	4.557.600	1	2.500.000	1	2.500.000	1	5.300.000
21					Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	3.719.150	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.500.000
22					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	4.000.000
23					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18	3.217.500	18	2.500.000	18	2.500.000	18	3.500.000
K.10				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	5.235.950	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
24					Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	2.760.200	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000

25					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14	2.475.750	14	2.500.000	14	2.500.000	14	2.500.000
K.1 1					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	13.573.550	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
26					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	6.810.900	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
K.1 2					Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	499.473.509	100	196.020.000	100	196.020.000	100	252.892.600
27					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	3.819.750	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000
28					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	60.383.365	12	41.500.000	12	41.500.000	12	41.500.000
29					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	7.278.600	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
30					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	92.747.794	12	32.000.000	12	32.000.000	12	42.000.000
31					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	21.750.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	17.000.000
32					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	47.520.000	12	15.520.000	12	15.520.000	12	15.520.000

33					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	85	14.875.000	30	6.500.000	30	6.500.000	30	6.500.000
34					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	195.899.000	41	50.000.000	41	50.000.000	41	91.872.600
35					Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	55.200.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
K.1 3				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.350.722.000	100	1.230.524.380	100	1.230.524.380	100	1.254.499.900
36					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	111.102.000	12	97.714.380	12	97.714.380	12	121.689.900
37					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	208.500.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000
38					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	1.031.120.000	12	962.810.000	12	962.810.000	12	962.810.000
K.1 4				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	654.663.460	100	191.574.600	100	192.050.120	100	232.902.000

39				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	242.800.000	14	170.574.600	14	171.050.120	14	203.832.000
40				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	177.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000
41				Jumlah mebel yang dipelihara	16	2.900.000	0	0	0	0	4	1.420.000
42				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63	181.963.460	23	12.000.000	23	12.000.000	23	18.650.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

A. Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PPKS

1. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi PPKS
2. Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada PPKS melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial
3. Penanganan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional
6. Pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kantor

B. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024-2026

1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal bagi PPKS;
3. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di luar panti;
4. Pemutakhiran berkala DTKS;
5. Optimalisasi DTKS sebagai basis data pemberian layanan kesejahteraan sosial
6. Penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan;
7. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam system layanan kesejahteraan;

8. Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsive dan adaptif terhadap bencana
9. Kolaborasi dan sinkronisasi pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial dengan pihak terkait
10. Meningkatkan kemampuan PSKS melalui pelaksanaan pembinaan, penilaian, bimbingan dan pemberian dana stimulasi
11. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan publik
12. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan
13. Melaksanakan sinergitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan

TABEL 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isu Strategis	1. Peningkatan pemahaman dan penerapan SPM urusan sosial sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota		
	2. Peningkatan kompetensi para sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial		
	3. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya (dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)		
	4. Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data		
Tujuan	(2) Menurunkan angka kemiskinan		
Sasaran	(1) Meningkatnya PPKS yang tertangani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan PPKS yang tertangani	1.1 Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	1.1.1 Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1.1.a Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti
			1.1.1.b Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bagi PPKS
			1.1.1.c Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di luar panti

		1.1.2 Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada PPKS melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial	1.1.2.a Pemutakhiran berkala DTKS 1.1.2.b Optimalisasi DTKS sebagai basis data pemberian layanan kesejahteraan sosial 1.1.2.c Penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan 1.1.2.d Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam sistem layanan kesejahteraan
		1.1.3 Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial	1.1.3.a Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif dan adaptif terhadap bencana 1.1.3.b Kolaborasi dan sinkronisasi pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial dengan pihak terkait
	1.2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.2.1 Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	1.2.1.a Meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelaksanaan pembinaan, penilaian, bimbingan dan pemberian dana stimulasi
	1.3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	1.3.1 Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional	1.3.1.a Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan publik
			1.3.1.b Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan
		1.3.2 Pemenuhan kebutuhan layanan penunjang kantor	1.3.2.a Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di masa datang, maka arah dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan ke dalam pokok-pokok program pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan PPKS yang tertangani				Persentase PPKS yang tertangani	6,22 %	6,22	8.673.437.826	7,69	8.914.913.346	9,16	9.653.413.346	9,16	27.241.764.518		
	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial			Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	96 %	100	2.472.814.000	100	2.622.814.000	100	3.122.814.000	100	8.218.442.000		
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	90,33 %	100	1.200.000.000	100	1.250.000.000	100	1.600.000.000	100	4.050.000.000		

				dasarnya diluar panti											
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	684 Orang	550	350.00 0.000	600	400.00 0.000	700	750.00 0.000	185 0	1.500.0 00.000		
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	684 orang	550	350.00 0.000	600	400.00 0.000	700	750.00 0.000	185 0	1.500.0 00.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS/PPKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani	560 orang	580	850.00 0.000	630	850.00 0.000	680	850.00 0.000	189 0	2.550.0 00.000		

		1.06.04. 2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	534 orang	550	730.00 0.000	600	730.00 0.000	650	730.00 0.000	180 0	2.190.0 00.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.04. 2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	30	120.00 0.000	30	120.00 0.000	30	120.00 0.000	90	360.000 .000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	99,9 % 7	100	722.81 4.000	100	822.81 4.000	100	972.81 4.000	100	2.518.4 42.000		
		1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang/keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	99,9 % 7	100	722.81 4.000	100	822.81 4.000	100	972.81 4.000	100	2.518.4 42.000		
		1.06.05. 2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota yang didata	125. orang 710	50.0 00	300.00 0.000	50.0 00	300.00 0.000	50.0 00	400.00 0.000	150. 000	1.000.0 00.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bangkalan

		1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	329 6	Keluar ga	185 0	400.00 0.000	200 0	500.00 0.000	200 0	550.00 0.000	5.85 0	1.450.0 00.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.05. 2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19	Keluar ga	20	22.814. 000	20	22.814. 000	20	22.814. 000	60	68.442. 000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85	%	100	550.00 0.000	100	550.00 0.000	100	550.00 0.000	100	1.650.0 00.000		
		1.06.06. 2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	85	%	100	500.00 0.000	100	500.00 0.000	100	500.00 0.000	100	1.500.0 00.000		
		1.06.06. 2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		orang	100 0	500.00 0.000	100 0	500.00 0.000	100 0	500.00 0.000	300 0	1.500.0 00.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.06. 2.02	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	80	%	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	150.000 .000		

		1.06.06. 2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	150.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Bangkalan
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			Persentase PSKS yang dibangun dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11,46 %	13	503.000.000	14	503.000.000	15	573.000.000	15	1.579.000.000		
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11,46 %	13	375.000.000	14	375.000.000	15	445.000.000	15	1.195.000.000		
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibangun	29 PSKS	28	375.000.000	28	375.000.000	29	445.000.000	29	1.195.000.000		

		1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnyakewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	18	150.00 0.000	18	150.00 0.000	18	150.00 0.000	18	450.000 .000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluar ga	50	100.00 0.000	50	100.00 0.000	50	120.00 0.000	150	320.000 .000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.02. 2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lemb aga	10	125.00 0.000	10	125.00 0.000	11	175.00 0.000	31	425.000 .000	Bidang Pengembangan Sosial	Kab. Bangkalan
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100	128.00 0.000	100	128.00 0.000	100	128.00 0.000	100	384.000 .000		
		1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Unit	1	128.00 0.000	1	128.00 0.000	1	128.00 0.000	1	384.000 .000		
		1.06.07. 2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Maka m	50	38.000. 000	50	38.000. 000	50	38.000. 000	50	114.000 .000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Bangkalan

		1.06.07. 2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Lapor an	2	90.000. 000	2	90.000. 000	2	90.000. 000	6	270.000. 000	Bidang Pember dayaan Sosial	Kab. Bangkalan
	Meningk atnya tata kelola penyelen ggaraan urusan sosial			Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5 Indeks	78	5.697.6 23.826	78,5	5.789.0 99.346	79	5.957.5 99.346	79	17.444. 322.518		
				Nilai SAKIP	60,7 Nilai	61		61,5		61,7		61,7			
		1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Indeks	100	5.697.6 23.826	100	5.789.0 99.346	100	5.957.5 99.346	100	17.444. 322.518		
		1.06.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	100	12.500. 000	100	12.500. 000	100	14.500. 000	100	39.500. 000		
		1.06.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doku men	2	4.500.0 00	2	4.500.0 00	2	6.500.0 00	6	15.500. 000	Sekretar iat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Doku men	2	1.500.0 00	2	1.500.0 00	2	1.500.0 00	6	4.500.0 00	Sekretar iat	Dinsos Bkl

		1.06.01. 2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	6	4.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	3	7.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	12	7.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100	4.057.004.846	100	4.148.004.846	100	4.192.804.846	100	12.397.814.538		
		1.06.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bulan	43	4.047.004.846	43	4.138.004.846	43	4.176.504.846	43	12.361.514.538	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	5.300.000	3	10.300.000	Sekretariat	Dinsos Bkl

		1.06.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.500.000	3	8.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	2.500.000	1	2.500.000	1	4.000.000	3	9.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	18 Laporan	18	2.500.000	18	2.500.000	18	3.500.000	54	8.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000		
		1.06.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	3	7.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	14 Laporan	14	2.500.000	14	2.500.000	14	2.500.000	42	7.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl

		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000		
		1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,7 %	100	196.020.000	100	196.020.000	100	252.892.600	100	644.932.600		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	36	10.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12	41.500.000	12	41.500.000	12	41.500.000	36	124.500.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12	32.000.000	12	32.000.000	12	42.000.000	36	106.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12	12.000.000	12	12.000.000	12	17.000.000	36	41.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl

		1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Doku men	12	15.520. 000	12	15.520. 000	12	15.520. 000	36	46.560. 000	Sekretar iat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	25	Lapor an	30	6.500.0 00	30	6.500.0 00	30	6.500.0 00	90	19.500. 000	Sekretar iat	Kab. Bangkalan
		1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	218	Lapor an	41	50.000. 000	41	50.000. 000	41	91.872. 600	123	191.872 .600	Sekretar iat	Seluruh Propinsi/K abupaten
		1.06.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Doku men	1	30.000. 000	1	30.000. 000	1	30.000. 000	3	90.000. 000	Sekretar iat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	1.230.5 24.380	100	1.230.5 24.380	100	1.254.4 99.900	100	3.715.5 48.660		
		1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Lapor an	12	97.714. 380	12	97.714. 380	12	121.68 9.900	36	317.118 .660	Sekretar iat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Lapor an	2	170.00 0.000	2	170.00 0.000	2	170.00 0.000	6	510.000 .000	Sekretar iat	Dinsos Bkl
		1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Lapor an	12	962.81 0.000	12	962.81 0.000	12	962.81 0.000	36	2.888.4 30.000	Sekretar iat	Dinsos Bkl

		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	191.574.600	100	192.050.120	100	232.902.000	100	616.526.720		
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14	170.574.600	14	171.050.120	14	203.832.000	14	545.456.720	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 Unit	10	9.000.000	10	9.000.000	10	9.000.000	10	27.000.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	0	0	0	0	4	1.420.000	4	1.420.000	Sekretariat	Dinsos Bkl
		1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 Unit	23	12.000.000	23	12.000.000	23	18.650.000	23	42.650.000	Sekretariat	Dinsos Bkl

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase PPKS yang tertangani	6,22%	6,22%	7,69%	9,16%	9,16%
2	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	96%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11,46%	13%	14%	15%	15%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,55	78	78,5	79	79
5	Nilai SAKIP	60,70	61	61,5	61,7	61,7

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90,33	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	85	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2024 -2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Sosial dalam kurun waktu periode Renstra berjalan. Dengan demikian unit kerja di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui Renstra tahun 2024 - 2026 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten Bangkalan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sosial sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2024 - 2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.